



Independensi Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan

Cahya Irani^{1*}, Rini Puji Astutik², Ervina Dwi Zahrotul A.³

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹Cahyairani2@email.com,

Abstrak

Kebijakan kebankentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library research yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral

Kata Kunci: Independensi, Ruang lingkup Kebijakan, Kebanksentralan

PENDAHULUAN

Kebijakan kebankentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. (**Setiawan, D. H., 2018**) Ruang lingkup kebijakan kebankentralan meliputi berbagai aspek, mulai dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, hingga kebijakan pengelolaan mata uang. Kebijakan moneter merupakan salah satu pilar utama kebankentralan. Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen seperti tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum digunakan untuk mengatur likuiditas dan kondisi kredit dalam perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter sangat tergantung pada independensi bank sentral dalam mengambil keputusan yang bebas dari campur tangan politik atau kepentingan jangka pendek.

Selain kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran juga menjadi bagian integral dari kebankentralan. Sistem pembayaran yang efisien dan aman sangat penting untuk kelancaran transaksi ekonomi. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan aman dan efisien. Hal ini meliputi pemberian izin kepada penyedia jasa sistem pembayaran, pengawasan pelaksanaan, serta penetapan standar dan prosedur yang harus dipatuhi (**Jumiati, E. 2022**).

Kebijakan pengelolaan mata uang juga menjadi bagian penting dari ruang lingkup kebijakan kebankentralan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam, serta menjaga kualitas dan keaslian uang yang beredar. Pengelolaan mata uang yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara bank sentral dan pemerintah, terutama dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali diubah, memberikan dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang diperlukan. Independensi Bank Indonesia dijamin oleh undang-undang, memungkinkan lembaga ini untuk menjalankan fungsinya dengan efektif

tanpa campur tangan dari pihak lain. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek.

(**Suhartono, S. 2009**) Analisis ekonomi itulah yang membuat Kebijakan kebanksentralan mencakup berbagai aspek yang esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, hingga kebijakan pengelolaan uang. Masing-masing kebijakan ini memiliki ruang lingkup dan tujuan spesifik yang saling mendukung untuk mencapai tujuan keseluruhan dari stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter, misalnya, bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan instrumen seperti tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum, bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas dan kondisi kredit dalam perekonomian. Kebijakan sistem pembayaran bertujuan untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan (**Tambunan,, 2024**).

Sehingga tujuan untuk Mengetahui bagaimana ruang lingkup kebijakan independensi kebanksentralan dapat tercapai dengan berbagai hasil riset yang pernah dikemukakan ke dalam naskah buku.

METODE

Metode penelitian menggunakan library research yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature atau referensi. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan (**Haryono et al., 2023**).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Kebanksentralan

(**Juhro, S. M., 2021**). Independensi merujuk pada kemampuan bank sentral untuk mengoperasikan berbagai instrumen pengendalian moneter tanpa arahan, panduan, atau intervensi dari Pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia, sebagai lembaga independen, dituntut untuk membangun sistem kelembagaan yang kuat dan mandiri dalam mengelola devisa. Dalam pengelolaan keuangan, Bank Indonesia harus bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain, kecuali sebagaimana diatur oleh undang-undang. Independensi Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Independensi Kelembagaan** (*Institutional Independence*):

Secara kelembagaan, Bank Indonesia adalah lembaga yang independen, artinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas. Independensi Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang, sehingga tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang yang berlaku secara nasional serta menetapkan sanksi terkait. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia tetap harus transparan dan akuntabel. Independensi ini terbatas pada tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang, dan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan serta menetapkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara nasional.

2. **Independensi Sasaran Akhir** (*Goal Independence*)

Independensi sasaran akhir Bank Indonesia berkaitan dengan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah dalam perumusan kebijakan moneter. Sasaran inflasi sebagai tujuan akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Keterlibatan Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter adalah bagian dari penjabaran tujuan yang diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, tingkat independensi Bank Indonesia dalam kebijakan moneter sangat tinggi. Bank Indonesia memberikan rekomendasi mengenai sasaran inflasi berdasarkan pertimbangan realistis yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan negara.

3. **Independensi Instrumen** (*Instrument Independence*)

Walaupun sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan sasaran-sasaran moneter dan menetapkan target operasional kebijakan moneter menggunakan berbagai instrumen yang biasanya digunakan oleh bank sentral. Dengan demikian, independensi instrumen Bank Indonesia sangat tinggi. Beberapa instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia meliputi operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum bank, dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan pinjaman kepada Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali dalam penanganan kesulitan perbankan yang memiliki dampak sistemik. Selain itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga.

Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan

Dalam menjalankan tugasnya, bank sentral menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Berikut adalah tiga jenis kebijakan yang dapat diterapkan oleh bank sentral (**Fadli, F., & SS, V. D. 2023**):

1. Kebijakan Moneter

Sebagai bank sentral di Indonesia, salah satu tugas dan wewenang utama Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan target-target moneter dengan mempertimbangkan sasaran inflasi, serta melakukan pengendalian moneter yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, operasi pasar terbuka.

2. Kebijakan Pasar Uang

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan operasi di pasar uang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto, menentukan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan.

Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan besaran moneter dan/atau suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan (**Mishkin, 2011**). Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi makro, yang ditandai dengan rendahnya inflasi dan tingginya lapangan kerja. Stabilitas inflasi meningkatkan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan daya saing di tingkat regional, seperti ASEAN. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai sebagai tujuan akhir pengelolaan ekonomi makro. Namun, implementasi kebijakan moneter dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme yang dipilih oleh masing-masing negara.

3. Kebijakan Makroprudensial

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam sistem keuangan, sifat pelaksanaan tugas bank sentral dapat dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan makroprudensial (macroprudential) dan mikroprudensial (microprudential). Namun, dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada pendekatan makroprudensial. Pada dasarnya, kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mencegah dan menghadapi krisis melalui penetapan kebijakan yang berupaya mencegah terjadinya risiko sistemik. Bank Indonesia melaksanakan tugas menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan instrumen-instrumen makroprudensial. Untuk menghindari risiko pemberian kredit yang berlebihan pada satu atau lebih sektor ekonomi tertentu, Bank Indonesia menggunakan instrumen loan-to-value (LTV) ratio. Misalnya, ketika pertumbuhan dan volume penyaluran kredit perbankan sudah terlalu besar kepada sektor properti, pada tahun 2012 Bank Indonesia menetapkan LTV ratio sebesar 70%. Ini berarti bahwa setiap pembelian rumah tapak atau apartemen, sang pembeli hanya akan mendapatkan kredit dari bank maksimum sebesar 70% dari nilai propertinya. Sisanya sebesar 30% harus dibiayai sendiri sebagai uang muka pembelian properti tersebut. Dengan demikian, risiko akumulasi kredit berlebih pada satu sektor, seperti properti, dapat diminimalkan. Jika terjadi guncangan ekonomi yang menyebabkan debitur properti gagal membayar pokok dan bunga cicilan, perbankan akan memiliki daya tahan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan perbankan untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, sehingga perekonomian secara keseluruhan dapat terus tumbuh. Selain itu, Bank Indonesia juga memantau perkembangan sistem keuangan dengan melakukan penilaian berkala terhadap kondisi sistem keuangan. Bank sentral melakukan pemantauan ini secara terukur menggunakan indikator-indikator yang andal.

4. Kebijakan Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah bagian integral dari siklus peredaran uang, karena berfungsi menyelesaikan transaksi keuangan di masyarakat, baik secara individual maupun institusional. Perkembangan sistem pembayaran terus maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Beberapa kewenangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan layanan sistem pembayaran untuk transfer dalam jumlah besar.
- b. Memberikan persetujuan dan izin untuk penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak lain,

memastikan layanan ini memenuhi persyaratan khususnya keamanan dan efisiensi.

c. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan kegiatannya, sehingga Bank Indonesia dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan sistem pembayaran oleh pihak yang telah disetujui dan diberi izin.

d. Menetapkan standar penggunaan alat pembayaran, memastikan alat pembayaran yang digunakan di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga bertanggung jawab memantau perluasan akses masyarakat terhadap alat pembayaran, sambil memastikan aspek-aspek perlindungan konsumen agar alat-alat tersebut aman digunakan.

Bank Indonesia memainkan peran penting dalam pengelolaan uang rupiah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam, mencabut dan menarik kembali uang rupiah dari peredaran, serta menjaga kelayakan uang rupiah melalui kegiatan penukaran. Dalam menjalankan tugas pengelolaan mata uang rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang. Bank Indonesia juga menentukan jenis, nilai, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

KESIMPULAN

"Independensi Ruang Lingkup Kebijakan Kebanksentralan" sangat penting untuk menggarisbawahi peran krusial dan kompleksitas yang dimiliki oleh bank sentral dalam mengelola kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Jurnal ini mengungkap bahwa independensi bank sentral merupakan prasyarat utama untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomi yang diberikan, seperti inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam konteks kebijakan moneter, independensi bank sentral memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal yang berlebihan, sehingga dapat menyesuaikan instrumen-instrumen kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi yang terkini. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter yang diambil, yang pada gilirannya mempengaruhi ekspektasi inflasi dan perilaku ekonomi masyarakat.

Selain itu, independensi instrumen memberikan bank sentral kewenangan untuk memilih dan mengimplementasikan berbagai alat kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan pengaturan cadangan minimum, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk secara efektif menanggapi tantangan ekonomi yang berbeda-beda tanpa ketergantungan pada otoritas politik.

Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral.

UCAPAN TERIMA KASIH

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada atas bimbingan dan dukungan mereka yang berharga. Juga, terima kasih kepada kolega dan teman-teman yang memberikan masukan dan motivasi selama proses penulisan. Semua kontribusi kalian sangat berarti bagi kesuksesan jurnal ini. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan."

DAFTAR PUSTAKA

- Jumiati, E. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1-14.
- Suhartono, S. (2009). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (Ssk) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Jpsk). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3), 518-533.
- Setiawan, D. H. (2018). Bauran Kebijakan Bank Sentral Untuk Menjaga Stabilitas Keuangan Dan Harga (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Tambunan, B. A. Y., Harahap, I., Nabillah, R., & Silaban, P. S. (2024). Peranan Dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jleb: Journal Of Law, Education And Business*, 2(1), 174-181.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Juhro, S. M. (2021). Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Fadli, F., & SS, V. D. (2023). Kebanksentralan: Menyelami Peran Vital Bank Sentral dalam Mengendalikan Ekonomi. Universitas Brawijaya Press.
- Mishkin, F. S. (2011). How Should Central Banks Respond to Asset-Price Bubbles? The 'Lean' versus 'Clean' Debate After the GFC | *Bulletin*—June 2011. *Bulletin*, (June).